



RENCANA KERJA TAHUN 2024

PENETAPAN

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

2023



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	7
TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
• Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.	12
• Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.	12
• Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.....	13
• Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.....	17
• Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.....	17
• Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.....	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III	36
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
BAB IV	38
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
4.1 Program dan Kegiatan	38
BAB V	44
PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan dan Penetapan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didahului dengan penyusunan rancangan awal, forum SKPD dan Musrenbang sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD, sehingga dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Mengawali persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, telah dibentuk Tim Penyusun Renja Biro Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim penyusun ini melaksanakan tugasnya mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, menelaah dokumen yang diperlukan, sampai pada merumuskan dan menyusun dokumen Renja Biro Umum.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Biro Umum mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan diterjemahkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini mempedomani Rencana Strategis Biro Umum Tahun 2022-2026.

1.2 Landasan Hukum

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelayanan Tamu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 49);
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
25. Surat Edaran Gubernur: 050/655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan kebijakan umum anggaran (KUA), merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan dalam RKA Biro Umum Tahun Anggaran 2024 serta mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Biro Umum Tahun 2024 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, serta Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjalankan 1 (satu) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
- c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Alokasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan total pagu sebesar **Rp.108.021.880.615,-** pada perubahan anggaran, dengan realisasi sebesar **Rp.103.782.205.225,- (96,08%)**. Rincian realisasi anggaran belanja langsung Biro Umum Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung TA. 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	108.021.880.615	103.782.205.225	96,08
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.709.782	376.168.284	98,03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170.735.500	166.980.834	97,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.810.000	10.968.000	92,87
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.810.000	10.609.000	89,83
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.994.400	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.101.750	6.101.000	99,99

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.055.532	123.985.250	99,94
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.197.000	52.529.800	96,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.534.819.322	41.741.591.759	93,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.669.799.372	40.921.164.285	93,71
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.260.000	266.357.500	94,37
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	429.985.150	407.495.775	94,77
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	118.704.800	115.291.999	97,12
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan	34.070.000	31.282.200	91,82
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	559.759.929	553.626.836	98,90
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52.150.000	49.804.500	95,50
Pengamanan Barang Milik Daerah	417.795.429	414.416.736	99,19
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.814.500	89.405.600	99,54
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	89.592.000	87.821.850	98,02
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.971.500	28.613.000	95,47
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	59.620.500	59.208.850	99,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	673.410.000	655.435.342	97,33
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	552.750.000	537.483.850	97,24
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.160.000	47.782.000	95,26
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	70.500.000	70.169.492	99,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.208.330.399	8.165.431.451	99,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	87.687.000	86.744.000	98,92
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	702.357.719	697.312.585	99,28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.495.407.500	2.479.904.559	99,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	405.787.500	405.146.500	99,84

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225.000.000	216.919.000	96,41
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.160.000	49.549.000	98,78
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.151.090.680	4.141.470.470	99,77
Penatausahaan Arsip Dinamis	90.840.000	88.385.337	97,30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.380.770.962	3.355.616.519	99,26
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	715.056.000	715.056.000	100,00
Pengadaan Mebel	1.375.379.520	1.357.651.875	98,71
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.290.335.442	1.282.908.644	99,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.645.663.553	13.873.313.781	94,73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	186.135.000	182.372.599	97,98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.956.846.266	3.492.434.119	88,26
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	914.530.000	905.610.750	99,02
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.588.152.287	9.292.896.313	96,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.975.229.945	9.653.978.008	96,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.013.000	226.929.536	95,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.784.656.174	1.732.109.050	97,06
Pemeliharaan Mebel	47.820.000	38.120.000	79,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	366.559.352	333.413.325	90,96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.866.452.591	6.675.080.707	97,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	672.728.828	648.325.390	96,37
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.071.049.601	4.988.235.848	98,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	244.244.496	241.803.743	99,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	560.857.000	557.992.000	99,49

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	22.492.000	22,49
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.165.948.105	4.165.948.105	100,00
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	20.499.545.122	20.330.985.547	99,18
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.783.049.000	8.713.616.884	99,21
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7.982.075.314	7.946.593.087	99,56
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.734.420.808	3.670.775.576	98,30
JUMLAH TOTAL	108.021.880.615	103.782.205.225	96,08

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2022, terdapat **2 (dua) sub kegiatan** yang tidak memenuhi target kinerja yang kurang dari 80,00% sesuai dengan yang direncanakan, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Mebel, jumlah dana Rp.47.820.000 realisasi sebesar Rp.38.120.000 (79,72%). Serapan tidak mencapaia target disebabkan perjalanan dinas yang lebih diefisienkan.
- 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.22.492.000,- (22,49%). Serapan tidak mencapai target disebabkan Medical Check Up KDH/WKDH dilakukan hanya oleh WKDH sedangkan KDH tidak melaksanakan kegiatan ini.

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2022, terdapat **8 (delapan) sub kegiatan**, kegiatan yang penyerapan anggarannya diatas **80,00% - 95,00%**. Namun demikian, tidak begitu mempengaruhi pencapaian target hasil/keluaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing sub kegiatan, karena secara fisik kegiatan tersebut telah terpenuhi. 8 (delapan) sub kegiatan dimaksud berikut penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, jumlah dana Rp.11.810.000 realisasi sebesar Rp.10.968.000 (92,87%). Serapan

anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, penyusunan dokumen RKA SKPD terlaksana

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD jumlah dana Rp.11.810.000 realisasi sebesar Rp.10.609.000 (89,83%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD terlaksana.
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah dana Rp.43.669.799.372 realisasi sebesar Rp.40.921.164.285 (93,71%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan.
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah dana Rp.282.260.000 realisasi sebesar Rp.266.357.500 (94,37%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Honor Pengelola Keuangan dan Aset terbayarkan.
- 5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD jumlah dana Rp.429.985.150 realisasi sebesar Rp.407.495.775 (94,77%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, verifikasi SPJ dan penatausahaan biro-biro lingkup Setda terlaksana.
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, jumlah dana Rp.34.070.000 realisasi sebesar Rp.31.282.200 (91,82%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Tanggapan terhadap pemeriksaan BPK dan Inspektorat dipenuhi.
- 7) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah dana Rp.3.956.846.266 realisasi sebesar Rp.3.492.434.119 (88,26%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, tagihan telepon, PDAM, listrik dan TV kabel serta internet terbayarkan.
- 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah dana Rp.366.559.352 realisasi sebesar Rp.333.413.325 (90,96%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, peralatan dan mesin lainnya terpelihara sesuai kerusakannya.

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Dari 49 sub kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran, terdapat **38 (Tiga Puluh Delapan)** kegiatan yang penyerapan anggarannya melebihi target yang ditetapkan **95%**.

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.170.735.500 realisasi sebesar Rp.166.980.834 (97,80). Serapan

anggaran melebihi target karena seluruh dokumen perencanaan selesai dilaksanakan.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, jumlah dana Rp.5.000.000 realisasi sebesar Rp.4.994.400 (99,89%). Serapan anggaran melebihi target karena DPA SKPD tersusun tepat waktu.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, jumlah dana Rp.6.101.750 realisasi sebesar Rp.6.101.000 (99,99%). Serapan anggaran melebihi target karena Perubahan DPA SKPD tersusun tepat waktu.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah dana Rp.124.055.532 realisasi sebesar Rp.123.985.250 (99,94%). Serapan anggaran melebihi target karena laporan capaian kinerja tersusun tepat waktu.
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.54.197.000 realisasi sebesar Rp.52.529.800 (96,92%). Serapan anggaran melebihi target karena dokumen evaluasi kinerja tersusun tepat waktu.
- 6) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, jumlah dana Rp.118.704.800 realisasi sebesar Rp.115.291.999 (97,12%). Serapan anggaran melebihi target karena dokumen penyusunan laporan akuntansi tersusun tepat waktu.
- 7) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, jumlah dana Rp.52.150.000 realisasi sebesar Rp.49.804.500 (95,50%). Serapan anggaran melebihi target karena dokumen perencanaan kebutuhan BMD tersusun tepat waktu.
- 8) Pengamanan Barang Milik Daerah, jumlah dana Rp.417.795.429 realisasi sebesar Rp.414.416.736 (99,19%). Serapan anggaran melebihi target karena terasuransikannya BMD Biro Umum seluruhnya.
- 9) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, jumlah dana Rp.89.814.500 realisasi sebesar Rp.89.405.600 (99,54%). Serapan anggaran melebihi target karena Laporan BMD tersusun sesuai hasil rekonsiliasi.
- 10) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, jumlah dana Rp.29.971.500 realisasi sebesar Rp.28.613.000 (95,47%). Serapan anggaran melebihi target karena dokumen perencanaan retribusi daerah tersusun tepat waktu.
- 11) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, jumlah dana Rp.59.620.500 realisasi sebesar Rp.59.208.850 (99,31%). Serapan anggaran melebihi target karena laporan retribusi tersusun tepat waktu.
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, jumlah dana Rp.552.750.000 realisasi sebesar Rp.537.483.850 (97,24%). Serapan anggaran melebihi target karena pengadaan pakaian dinas untuk seluruh ASN dan Non ASN terlaksana.

- 13) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, jumlah dana Rp.50.160.000 realisasi sebesar Rp.47.782.000 (95,26%). Serapan anggaran melebihi target karena Monev dan penilaian kinerja pegawai terlaksana secara berkala.
- 14) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah dana Rp.70.500.000 realisasi sebesar Rp.70.169.492 (99,53%). Serapan anggaran melebihi target karena ASN dan Non ASN mengikuti Bimtek sesuai undangan yang ada.
- 15) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor, jumlah dana Rp.87.687.000 realisasi sebesar Rp.86.744.000 (98,92%). Serapan anggaran melebihi target karena penerangan bangunan kantor terpenuhi.
- 16) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.702.357.719 realisasi sebesar Rp.697.312.585 (99,28%). Serapan anggaran melebihi target karena terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 17) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, jumlah dana Rp.2.495.407.500 realisasi sebesar Rp.2.479.904.559 (99,38%). Serapan anggaran melebihi target karena terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor.
- 18) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah dana Rp.405.787.500 realisasi sebesar Rp.405.146.500 (99,84%). Serapan anggaran melebihi target karena bahan logistic kantor terpenuhi.
- 19) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, jumlah dana Rp.225.000.000 realisasi sebesar Rp.216.919.000 (96,41%). Serapan anggaran melebihi target karena barang cetakan dan penggandaan terpenuhi.
- 20) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah dana Rp.50.160.000 realisasi sebesar Rp.49.549.000 (98,78%). Serapan anggaran melebihi target karena bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi.
- 21) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah dana Rp.4.151.090.680 realisasi sebesar Rp.4.141.470.470 (99,77%). Serapan anggaran melebihi target karena rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana.
- 22) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, jumlah dana Rp.90.840.000 realisasi sebesar Rp.88.385.337 (97,30). Serapan anggaran melebihi target karena penatausahaan arsip dinamis biro umum terlaksana.
- 23) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah dana Rp.715.056.000 realisasi sebesar Rp.715.056.000 (100%). Serapan

anggaran melebihi target karena pengadaan kendaraan dinas operasional terlaksana.

- 24) Pengadaan Mebel, jumlah dana Rp.1.375.379.520 realisasi sebesar Rp.1.357.651.875 (98,71%). Serapan anggaran melebihi target karena seluruh pengadaan mebel terlaksana.
- 25) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah dana Rp.1.290.335.442 realisasi sebesar Rp.1.282.908.644 (99,42%). Serapan anggaran melebihi target karena pengadaan peralatan dan mesin lainnya terlaksana.
- 26) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah dana Rp.186.135.000 realisasi sebesar Rp.182.372.599 (97,98%). Serapan anggaran melebihi target karena fasilitasi persuratan setda terlaksana.
- 27) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.914.530.000 realisasi sebesar Rp.905.610.750 (99,02%) Serapan anggaran melebihi target karena jasa peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi.
- 28) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah dana Rp.9.588.152.287 realisasi sebesar Rp.9.292.896.313 (96,92%). Serapan anggaran melebihi target karena biaya kebersihan, keamanan serta honor tenaga kontrak terbayarkan.
- 29) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah dana Rp.237.013.000 realisasi sebesar Rp.226.929.536 (95,75%). Serapan anggaran melebihi target karena pemeliharaan dan pajak kendaraan terbayarkan.
- 30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah dana Rp.1.784.656.174 realisasi sebesar Rp.1.732.109.050 (97,06%). Serapan anggaran melebihi target karena pemeliharaan dan pajak kendaraan terbayarkan.
- 31) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah dana Rp.6.866.752.591 realisasi sebesar Rp.6.675.080.707 (97,21%). Serapan anggaran melebihi target karena Gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara.
- 32) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah dana Rp.672.728.828 realisasi sebesar Rp.648.325.390 (96,37%). Serapan anggaran melebihi target karena sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor terpelihara.
- 33) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.244.244.496 realisasi sebesar Rp.241.803.743 (99,00%). Serapan anggaran melebihi target karena Gaji KDH/WKDH terbayarkan.

- 34) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.560.857.000 realisasi sebesar Rp.557.992.000 (99,49%). Serapan anggaran melebihi target karena pakaian dinas KDH/WKDH terpenuhi.
- 35) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.4.165.948.105 realisasi sebesar Rp.4.165.948.105 (100,00%). Serapan anggaran melebihi target karena belanja operasional KDH/WKDH terbayarkan.
- 36) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, jumlah dana Rp.8.783.049.000 realisasi sebesar Rp.8.713.616.884 (99,21%). Serapan anggaran melebihi target karena kebutuhan rumah tangga KDH terpenuhi.
- 37) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.7.982.075.314 realisasi sebesar Rp.7.946.593.087 (99,56%). Serapan anggaran melebihi target karena kebutuhan rumah tangga WKDH terpenuhi.
- 38) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, jumlah dana Rp.3.734.420.808 realisasi sebesar Rp.3.670.775.576 (98,30%). Serapan anggaran melebihi target karena karena kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah terpenuhi.

- **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.**

- Tidak tercapainya target kinerja keuangan 2 sub kegiatan dimaksud, diantaranya adalah menyesuaikan dengan regulasi yang ada, pemeliharaan mebel dan kebutuhan medical check up KDH/WKDH.
- Terpenuhinya target hasil/keluaran 47 kegiatan lainnya, disebabkan faktor perbaikan proses perencanaan, perbaikan fungsi pengendalian oleh pelaksana kegiatan, serta komitmen terhadap efisiensi belanja barang/jasa.

- **Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.**

Akibat dari 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target serapan anggaran tersebut tidak begitu mempengaruhi capaian Renstra Biro Umum (pencapaian tujuan dan sasaran strategis). karena secara keseluruhan realisasi keuangan biro umum mencapai 96,08% dan fisik mencapai 100,00%.

- **Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.**

Langkah yang perlu dilakukan mengatasi hal tersebut adalah mereview dan menyesuaikan kembali jumlah belanja anggaran kegiatan yang lebih sesuai

dengan perencanaan dan kebutuhan yang dapat diprediksi. Sedangkan kebutuhan belanja rutin/tidak rutin yang sulit diprediksi perlu tetap dianggarkan dengan mempertimbangkan trend realisasi tahun lalu.

Tindakan lainnya yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki proses perencanaan anggaran yang lebih baik lagi, dengan cara memperoleh data-data yang lebih akurat dengan didukung dokumen yang lebih lengkap. Serta diperlukan juga komitmen dari pelaksana kegiatan dan rekanan untuk selalu menjaga integritas dan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang didukung dengan sistem pengendalian yang baik.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Biro Umum s/d Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Nama PD : Biro Umum (Setda)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN TAHUN 2021 (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN SKPD TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN 2023	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	800%	9	10	11
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	6 Dokumen							
4.01.01.1.01.02	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	-	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
4.01.01.1.01.03	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
4.01.01.1.01.04	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
4.01.01.1.01.05	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
4.01.01.1.01.06	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	26 dokumen	26 dokumen	100%
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun						12 dokumen	12 dokumen	100%
4.01.01.1.01.07	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%			
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.02.01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	500 Orang	100%
4.01.01.1.02.02	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	-	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%
4.01.01.1.02.03	c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang Diterbitkan	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	100%	120 Dokumen	120 Dokumen	100%
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor	15 Orang							
4.01.01.1.02.06	d Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN TAHUN 2021 (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN SKPD TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN 2023	TINGKAT CAPAIAN	
4.01.01.1.02.07	e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.03.01	a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%			
4.01.01.1.03.02	b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	43 unit	43 unit	43 unit	43 unit	100%	43 unit	43 unit	100%
4.01.01.1.03.04	c	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorusnya	5 orang					5 orang	5 orang	100%
4.01.01.1.03.05	d	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
4.01.01.1.03.06	e	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	2 dokumen							
			Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
4.01.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.04.01	a	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.04.02	b	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	2 dokumen							
			Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen							
4.01.01.1.04.03	c	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	1 Kali							
4.01.01.1.04.07	d	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah			12 dokumen	12 dokumen	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN TAHUN 2021 (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN SKPD TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN 2023	TINGKAT CAPAIAN
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.1.05.02	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1000 Stel		700 Stel	700 Stel	100%			
4.01.01.1.05.05	b Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya		200 Pegawai	200 Pegawai	200 Pegawai	100%			
4.01.01.1.05.09	c Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll (baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang diikuti oleh aparatur Perangkat Daerah)	200 Orang					120 org	120 org	100%
4.01.01.1.05.11	d Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek			50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
		Bimtek Staf Ahli se Sumatera Barat yang Diselenggarakan						1 kali	1 Kali	100%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.1.06.01	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis		50 Jenis	50 Jenis	100%	50 Jenis	50 Jenis	100%
4.01.01.1.06.02	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Jenis		50 Jenis	50 Jenis	100%	50 Jenis	50 Jenis	100%
4.01.01.1.06.03	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis		60 Jenis	60 Jenis	100%	60 Jenis	60 Jenis	100%
4.01.01.1.06.04	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 jenis		6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
4.01.01.1.06.05	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 jenis		20 jenis	20 jenis	100%	20 jenis	20 jenis	100%
4.01.01.1.06.06	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis		3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
4.01.01.1.06.08	g Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Dilayani	500 Orang					500 Orang	500 Orang	100%
4.01.01.1.06.09	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	500 dokumen		500 dokumen	500 dokumen	100%	500 dokumen	500 dokumen	100%
		Rapat Koordinasi Staf Ahli se Sumatera Barat yang Diselenggarakan	1 Kali		1 Kali	1 Kali	100%			
4.01.01.1.06.10	i Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	3 Arsip		3 Arsip	3 Arsip	100%			
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.1.07.01	a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	3 Unit	2 Unit						
4.01.01.1.07.02	b Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	5 unit					1 unit	1 unit	100%
4.01.01.1.07.05	c Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100 unit		100 unit	100 unit	100%	100 unit	100 unit	100%
4.01.01.1.07.06	d Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	50 unit		50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN TAHUN 2021 (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN SKPD TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN 2023	TINGKAT CAPAIAN
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.08.01	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	3000 surat	3000 surat	3000 surat	3000 surat	100%	3000 surat	3000 surat	100%
4.01.01.1.08.02	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	55.000 M3	55.000 M3	55.000 M3	55.000 M3	100%	55.000 M3	55.000 M3	100%
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1.600.000 KWH	1.600.000 KWH	1.600.000 KWH	1.600.000 KWH	100%	1.600.000 KWH	1.600.000 KWH	100%
		Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	100 mbps	100 mbps	100 mbps	100 mbps	100%	100 mbps	100 mbps	100%
		Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	100%	3 Rekening	3 Rekening	100%
4.01.01.1.08.03	c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
4.01.01.1.08.04	d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	260 orang	260 orang	260 orang	260 orang	100%	260 orang	260 orang	100%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.09.01	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
4.01.01.1.09.02	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	100%	60 unit	60 unit	100%
4.01.01.1.09.05	c Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	100 Unit		100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	100 Unit	100%
4.01.01.1.09.06	d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	150 Unit		150 Unit	150 Unit	100%	150 Unit	150 Unit	100%
4.01.01.1.09.09	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
4.01.01.1.09.10	f Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (Contoh: Lift, AC Central)	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.11.01	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
4.01.01.1.11.02	b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 stel	50 stel	50 stel	50 stel	100%	50 stel	50 stel	100%
4.01.01.1.11.03	c Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN TAHUN 2021 (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN SKPD TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN BERJALAN	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	TINGKAT REALI-SASI (%)		REALISASI CAPAIAN 2023	TINGKAT CAPAIAN
4.01.01.1.11.04	d Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun anggaran	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	100%
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	100%
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu yang Disediakan	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100%	25 Jenis	25 Jenis	100%

* Note : Untuk pengisian kolom 5 sampai dengan 8 dikosongkan dikarenakan adanya perubahan nama program dan kegiatan serta sub kegiatan pada permendagri 90 th 2019

Padang, Juni 2023
Kepala Biro Umum

SYEFDINON, S.Sos.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19720713 199803 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mengampu salah satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja kunci seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai unit pendukung (*supporting unit*) pada Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan atau fungsi penunjang, antara lain : pelayanan tamu rumah tangga KDH dan WKDH, Pelayanan Pimpinan mulai dari Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Administrasi Keuangan Kesekretariatan yang berkaitan dengan **Misi ke-7 RPJMD “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”**. pada *Tujuan* “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, *Sasaran Ketiga* “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Indek Persepsi Kualitas Pelayanan”.

Untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah perlu dirumuskan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Biro Umum sesuai dengan Renstra telah merumuskan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai keberhasilan kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Indikator Kinerja Utama Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Biro Umum Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholders</i> di bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Adminsitarsi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)
		IKM Pelayanan Pimpinan	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)
2	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)
3	Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Umum
Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BIRO UMUM				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	-	-	88,31	88,50	88,70	88,90	-	89,90	89,38	88,70	88,90	Proyeksi merujuk pada realisasi capaian tahun 2021
2	IKM Pelayanan Pimpinan	-	-	88,31	88,50	88,70	88,90	-	88,39	89,18	88,70	88,90	
3	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	-	-	88,31	88,50	88,70	88,90	-	87,90	89,02	88,70	88,90	
4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	72,65 (BB)	70,68 (BB)		70 (BB)	70 (BB)	
5	% realisasi penerimaan retribusi	-	-	95%	95%	95%	95%	204.17%	111,35%		95%	95%	

Padang, Juni 2023
Kepala Biro Umum



SYEFDINON, S.Sos.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19720713 199803 1 002

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mencermati permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang terkait, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini, Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada periode RPJMD ke-IV (2021-2026) yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, serta agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta SDM pelayanan yang handal, maka Biro Umum memiliki peran strategis sebagai yang terdepan dalam:
 - a. Terdepan dalam Pelayanan Pimpinan terkait dengan pengendalian internal guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
 - b. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Rumah Tangga KDH/WKDH. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum.

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi. Semakin tingginya intensitas pekerjaan yang dihadapi akan tetapi struktur organisasi justru mengecil, seolah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Berperan sebagai *supporting unit* Pelayanan Tamu, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda, Biro Umum turut mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah peminjaman fasilitas gedung, ruang rapat, kendaraan dinas dan ruang teleconference yang dapat diajukan permohonannya secara online. Pengembangan pelayanan fasilitas ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PAD). Selain itu, inovasi pada pelayanan internal dapat berupa mekanisme verifikasi administrasi pencairan dana melalui tim verifikasi, penggunaan sistem pengarsipan administrasi kegiatan di tingkat bagian/subbagian, penggunaan system register pemakaian BBM, sistem informasi penatausahaan BMD Lingkup Setda, serta system informasi rencana kebutuhan BMD Lingkup Setda.

Peluang pengembangan pelayanan Pimpinan oleh Biro Umum dapat berupa: pertama, revitalisasi sistem pengendalian internal oleh Gubernur. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kontrol internal oleh Gubernur kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya di daerah, dengan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi setiap bulannya. Kedua, revitalisasi system pengendalian internal oleh Wakil Gubernur dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kontrol internal oleh Wakil Gubernur kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka perannya sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang ramah dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan scope kebijakan Biro Umum kedepannya dapat difokuskan kepada *Pertama, **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Tamu Rumah Tangga, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda**; Kedua, **Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**; dan ketiga, **Peningkatan Pencapaian Target Retribusi***. Sedangkan kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya

Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan sarana prasarana yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung/asset yang dikelola serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.
2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekrutmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum seperti pemanfaatan aplikasi SiMiraSimpel, SisPensu, SiPintas dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 5 (lima) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Penginapan di Istana Bung Hatta, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan rumusan program dan besaran pagu indikatif pada rancangan awal RKPD Tahun 2024, dan membandingkannya dengan hasil analisis kebutuhan anggaran Tahun 2024, dapat dilihat bahwa 1 (satu) program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun besaran rancangan awal RKPD programnya berbeda cukup jauh.

Jumlah dana yang diindikasikan pada RKPD belum sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Total pagu indikatif RKPD sebesar **Rp.63,414 milyar**.

Kebutuhan anggaran ini didasarkan pada besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan fisik gedung serba guna Pemprov di Padang Baru rehab rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda, dan rehab ruang kerja KDH/WKDH/Sekda serta Pembangunan Mesjid di Area Gubernuran. Selain itu, ada penambahan kegiatan Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu yang merupakan kebutuhan operasional Mess di Bukit Lampu. Penambahan kebutuhan lainnya merupakan analisis kebutuhan biaya belanja rutin yang setiap tahunnya selalu meningkat, seperti kenaikan tarif listrik PLN, tarif PDAM, telfon, kenaikan beban operasional dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana lainnya, sampai kepada kenaikan belanja rumah tangga pimpinan dan yang cukup besar adalah meningkatnya kunjungan Tamu Pemda.

Hasil review rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C 31 berikut ini:

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Nama PD: Biro Umum (Setda)

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (YANG SEHARUSNYA UNTUK TAHUN 2024)					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				63.414.623.000	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH				142.633.841.775	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	63.414.623.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Sumbar	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	142.633.841.775	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	246.963.640	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	366.019.000	
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	100.000.000	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	198.832.000	
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	14 dokumen	73.481.820	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	110.000.000	
	d Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	14 dokumen	73.481.820	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	14 dokumen	57.187.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	2.680.271.189	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	50.965.686.992	
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumbar	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	500 Orang	2.000.000.000	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Sumbar	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	500 Orang	50.331.756.992	
	c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang Diterbitkan	120 Dokumen	530.271.189	c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang Diterbitkan	120 Dokumen	433.930.000	
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran yang disiapkan	12 dokumen	150.000.000	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran yang disiapkan	12 dokumen	200.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik	100%	576.320.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik	100%	590.000.000	
	b Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah BMD yang diasuransikan	43 unit	422.000.000	b Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah BMD yang diasuransikan	43 unit	422.000.000	
	c Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoranya	5 orang	34.320.000	c Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoranya	5 orang	18.000.000	
	e Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	120.000.000	e Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	150.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan	100%	200.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan	100%	200.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	1 Kali	150.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	1 Kali	150.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (YANG SEHARUSNYA UNTUK TAHUN 2024)					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	1.656.582.587	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	1.700.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Sumbar	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	700 Stel	1.100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Sumbar	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1000 Stel	1.100.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	500 Orang	556.582.587	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumbar	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	200 Orang	600.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat	100%	7.419.014.595	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat	100%	14.016.169.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis	74.481.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 Jenis	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Jenis	682.126.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Jenis	1.100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	842.302.345	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Sumbar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	1.900.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 jenis	305.285.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 jenis	348.518.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 jenis	173.921.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Sumbar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 jenis	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	50.058.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Provinsi Sumbar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	50.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Sumbar	Jumlah Tamu yang Dilayani	500 Orang	200.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi Sumbar	Jumlah Tamu yang Dilayani	500 Orang	200.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	500 dokumen	5.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	500 dokumen	10.026.811.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	3 Arsip	90.840.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Sumbar	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	3 Arsip	90.840.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai	100%	2.995.926.599	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai	100%	13.676.491.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	3 Unit	482.074.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	1 Unit	1.450.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	15 unit	1.500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	5 unit	3.500.000.000	
	Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah mebel yang diadakan	100 unit	692.911.879	Pengadaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah mebel yang diadakan	100 unit	5.877.741.000	
	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	50 unit	320.940.720	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	50 unit	2.848.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	16.603.497.667	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	16.786.115.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	3000 surat	120.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	3000 surat	186.135.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumbar	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang	55.000 M3	3.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumbar	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang	55.000 M3	3.500.000.000	
Jumlah tagihan listrik (PLN)			1.600.000	Jumlah tagihan listrik (PLN)				1.600.000			
Jumlah kapasitas tagihan			100 mbps	Jumlah kapasitas tagihan				100 mbps			
Jumlah rekening tagihan			3 Rekening	Jumlah rekening tagihan				3 Rekening			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	800.130.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Sumbar	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	1.099.980.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	260 orang	12.183.367.667	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sumbar	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	260 orang	12.000.000.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (YANG SEHARUSNYA UNTUK TAHUN 2024)					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100%	11.630.982.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100%	12.572.488.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	5 unit	230.982.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Sumbar	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	5 unit	237.013.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	60 unit	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumbar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	60 unit	2.335.475.000	
	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	100 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	100 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	150 Unit	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	150 Unit	300.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	10 Unit	9.000.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	10 Unit	9.000.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Contoh: Lift, AC Central)	5 Jenis	600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Sumbar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Contoh: Lift, AC Central)	5 Jenis	600.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Peesentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil	100%	1.010.282.617	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Peesentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil	100%	4.625.157.321	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	254.512.496	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	254.512.496	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 stel	250.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	50 stel	350.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	100.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun anggaran	2 Orang	405.770.121	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun anggaran	2 Orang	3.920.644.825	
	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang	100%	18.394.782.106	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Provinsi Sumbar	Persentase Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang	100%	27.135.714.962	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Jenis	7.781.580.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	25 Jenis	11.342.314.281	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25 Jenis	7.032.683.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	25 Jenis	10.304.314.281	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu yang Disediakan	25 Jenis	3.580.518.606	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Provinsi Sumbar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu yang Disediakan	25 Jenis	5.489.086.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

**Perangkat Daerah: Biro
Umum Setda**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Setelah mencermati kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki program yang berkaitan dengan kebijakan nasional, karena fungsi Biro Umum yang merupakan fungsi penunjang/*supporting unit* pada sekretariat daerah dan bukan Perangkat Daerah teknis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan arah atau kondisi akhir yang diharapkan yang akan diwujudkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024, di tetapkan 3 (tiga) Sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Umum. Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH”, “IKM Pelayanan Pimpinan” dan “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda. Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” dan Sasaran 3 “Meningkatnya pencapaian Target Retribusi” diukur dengan 1 (satu) indicator yaitu “% realisasi penerimaan retribusi”.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja 2023 Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				KET
					2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,31 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)	88,70 (Sangat Baik)	88,90 (Sangat Baik)	
				IKM Pelayanan Pimpinan	88,31 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)	88,70 (Sangat Baik)	88,90 (Sangat Baik)	
				IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,31 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)	88,70 (Sangat Baik)	88,90 (Sangat Baik)	
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	95%	95%	95%	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, serta penjabaran dari Misi ke-7 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”, pada Tujuan “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, Sasaran Ketiga “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan”.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum serta rumusan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada Renstra Perubahan Biro Umum 2021-2026, dan mencermati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, maka dirumuskan **1 (satu) program** dengan **11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan** yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan 1 (satu) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan tersebut, digulirkan untuk menunjang fungsi utama Biro Umum sebagai yang terdepan dalam Pelayanan Tamu Pemda dan Pelayanan Pimpinan serta Kesekretariatan. Semua kegiatan akan dilaksanakan di Kota Padang, namun demikian sebagian pekerjaan fisik seperti pembangunan atau rehabilitasi gedung milik Biro Umum, ada yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi.

Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan 1 (satu) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada Tahun 2024 sebesar **Rp.142.393.842.275** Jumlah tersebut naik sekitar 19.35% dari pagu dana Tahun 2023 yang sebesar **Rp.114.826.491.273**.

Program dan kegiatan beserta rencana target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 beserta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat
(Rp.)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH				142.411.655.275				142.411.655.275				
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Provinsi Sumbar	100%	142.411.655.275	APBD		100%	142.411.655.275	
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Provinsi Sumbar	100%	383.832.000	APBD		100%	383.832.000	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Provinsi Sumbar Provinsi Sumbar	2 Dokumen 6 Dokumen	198.832.000	APBD		2 Dokumen	198.832.000
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi Sumbar	14 dokumen	110.000.000	APBD		3 dokumen	110.000.000
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Provinsi Sumbar	15 dokumen	75.000.000	APBD		14 dokumen	75.000.000
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Provinsi Sumbar	100%	50.965.686.992	APBD		100%	50.965.686.992
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Provinsi Sumbar	500 Orang	50.331.756.992	APBD		500 Orang	50.331.756.992
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang Diterbitkan Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah	Provinsi Sumbar Provinsi Sumbar	120 Dokumen 13 Orang	433.930.000	APBD		15 Orang	433.930.000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan	Provinsi Sumbar	12 dokumen	200.000.000	APBD		120 Dokumen	200.000.000
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Provinsi Sumbar	100%	590.000.000	APBD		100%	590.000.000
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Provinsi Sumbar	43 unit	422.000.000	APBD		6 Dokumen	422.000.000
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Provinsi Sumbar	5 orang	18.000.000	APBD		43 unit	18.000.000
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Provinsi Sumbar	1 dokumen	150.000.000	APBD		5 orang	150.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4 01 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	Provinsi Sumbar	100%	200.000.000	APBD		100%	200.000.000
4 01 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
		Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah		1 dokumen					
		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah		12 dokumen					
4 01 01 1.04	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Provinsi Sumbar	1 Kali	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	100%	1.500.000.000	APBD		100%	1.500.000.000
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Provinsi Sumbar	1000 Stel	1.100.000.000	APBD		1000 Stel	1.100.000.000
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll	Provinsi Sumbar	100 Orang	400.000.000	APBD		100 Orang	400.000.000
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Building ASN dan Non ASN Biro Umum		1 Kali				1 Kali	
		Jumlah Bimtek Staf Ahli yang Diadakan		1 Kali				1 Kali	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	100%	14.016.169.500	APBD		100%	14.016.169.500
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Provinsi Sumbar	50 Jenis	100.000.000	APBD		50 Jenis	100.000.000
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Sumbar	50 Jenis	1.100.000.000	APBD		50 Jenis	1.100.000.000
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Provinsi Sumbar	60 Jenis	1.900.000.000	APBD		60 Jenis	1.900.000.000
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumbar	6 jenis	348.518.500	APBD		6 jenis	348.518.500
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Provinsi Sumbar	20 jenis	200.000.000	APBD		20 jenis	200.000.000
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Provinsi Sumbar	3 jenis	50.000.000	APBD		3 jenis	50.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Dilayani	Provinsi Sumbar	500 Orang	200.000.000	APBD		500 Orang	200.000.000
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Provinsi Sumbar	500 dokumen	10.026.811.000	APBD		500 dokumen	10.026.811.000
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	Provinsi Sumbar	3 Arsip	90.840.000	APBD		3 Arsip	90.840.000
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Provinsi Sumbar	100%	13.676.491.000	APBD		100%	13.676.491.000
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Provinsi Sumbar	1 Unit	1.450.000.000	APBD		1 Unit	1.450.000.000
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	Provinsi Sumbar	5 unit	3.500.000.000	APBD		5 unit	3.500.000.000
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Provinsi Sumbar	100 unit	5.877.741.000	APBD		100 unit	5.877.741.000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Sumbar	50 unit	2.848.750.000	APBD		50 unit	2.848.750.000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Sumbar	100%	16.746.115.500	APBD		100%	16.746.115.500
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Provinsi Sumbar	3000 surat	186.135.000	APBD		3000 surat	186.135.000
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Provinsi Sumbar	55.000 M3	3.460.000.500	APBD		55.000 M3	3.460.000.500
					Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Provinsi Sumbar	1.600.000 KWH						
					Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	Provinsi Sumbar	100 mbps						
					Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Provinsi Sumbar	3 Rekening						
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Sumbar	8 Jenis	1.099.980.000	APBD		8 Jenis	1.099.980.000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Provinsi Sumbar	260 orang	12.000.000.000	APBD		260 orang	12.000.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Provinsi Sumbar	100%	12.572.488.000	APBD		100%	12.572.488.000
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Provinsi Sumbar	5 unit	237.013.000	APBD		5 unit	237.013.000
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Provinsi Sumbar	60 unit	2.335.475.000	APBD		60 unit	2.335.475.000
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Provinsi Sumbar	100 Unit	100.000.000	APBD		100 Unit	100.000.000
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Sumbar	150 Unit	300.000.000	APBD		150 Unit	300.000.000
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Provinsi Sumbar	10 Unit	9.000.000.000	APBD		10 Unit	9.000.000.000
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Contoh: Lift, AC Central)	Provinsi Sumbar	5 Jenis	600.000.000	APBD		5 Jenis	600.000.000
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik	Provinsi Sumbar	100%	4.625.157.321	APBD		100%	4.625.157.321
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	2 orang	254.512.496	APBD		2 orang	254.512.496
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Provinsi Sumbar	50 stel	350.000.000	APBD		50 stel	350.000.000
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Sumbar	10 Orang	100.000.000	APBD		10 Orang	100.000.000
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun anggaran	Provinsi Sumbar	2 Orang	3.920.644.825	APBD		2 Orang	3.920.644.825

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 (SESUAIKAN DENGAN RENSTRA 2021-2026)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4 01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik	Provinsi Sumbar	100%	27.135.714.962	APBD		1	27.135.714.962
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Provinsi Sumbar	25 Jenis	11.342.314.281	APBD		25 Jenis	11.342.314.281
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Provinsi Sumbar	25 Jenis	10.304.314.281	APBD		25 Jenis	10.304.314.281
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu yang Disediakan	Provinsi Sumbar	25 Jenis	5.489.086.400	APBD		25 Jenis	5.489.086.400

Padang, Juni 2023
Kepala Biro Umum

Syefdinon, S.Sos. M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19720713 199803 1 002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan pedoman bagi seluruh Bagian pada Biro Umum dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan agar memiliki satu persepsi yang sama tentang tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang optimal.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Karenanya, untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Umum tahun 2024 ini disusun untuk memberi gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Padang, Juni 2023

KEPALA BIRO UMUM,

Syefdinon, S.Sos. M.M.

Pembina Tk. I,

NIP. 19720713 199803 1 002